

PERINGATAN 200 TAHUN KEMATIAN NAPOLEON BONAPARTE

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Macron berdiri di depan makam Napoleon saat upacara peringatan 200 tahun kematian Napoleon Bonaparte, di Hotel des Invalides di Paris, Prancis, Rabu (5/5).

Sebanyak 24 Tewas dalam Aksi Protes Anti Pemerintah di Kolombia

Protes anti-pemerintah yang mematikan juga mendapat perhatian dari para selebriti, termasuk bintang pop Kanada Justin Bieber dan bintang musik Kolombia seperti Shakira, Maluma dan J Balvin.

BOGOTA(IM) - Kolombia diguncang aksi protes selama tujuh hari berturut saat kelompok internasional dan selebriti mulai memberikan perhatian atas aksi kekerasan yang menewaskan 24 orang dan ratusan lainnya terluca. Ombudsman Kolombia mengatakan pada Rabu bahwa 24 orang - 23 warga sipil dan satu petugas polisi - telah tewas dalam aksi protes yang dimulai 28 April lalu. Kerusuhan baru-baru ini awalnya dipicu oleh keputusan Presiden Kolombia Ivan Duque yang bulan lalu berusaha untuk mengesahkan RUU reformasi pajak dengan tujuan mengurangi krisis ekonomi dengan menaikkan pajak atas beberapa barang penting dan layanan publik. Sementara Duque membatalkan RUU itu untuk saat ini, aksi protes telah berubah menjadi gerakan yang lebih besar dengan fokus pada me-

Kolombia harus menghormati hak asasi manusia. "Ketidakpuasan masyarakat atas ketidaksetaraan di Kolombia tidak boleh dicap sebagai 'vandalisme dan terorisme', juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk penindasan dengan kekerasan," kata organisasi itu seperti dikutip dari CBS News, Kamis (6/5). Protes anti-pemerintah yang mematikan juga mendapat perhatian dari para selebriti, termasuk bintang pop Kanada Justin Bieber dan bintang musik Kolombia seperti Shakira, Maluma dan J Balvin, yang semuanya setuju dengan situasi di negara asal mereka. Bintang Reggaeton J Balvin menyecurkan "perdamaian dan cinta" di akun Instagramnya. "Situasinya di luar kendali. Ini hak asasi manusia. Kami butuh bantuan Kolombia," tulisnya. Temblores, sebuah organisasi nirlaba independen yang memantau kekerasan polisi di Kolombia, mengklaim jumlah kematian warga sipil lebih 21 tinggi daripada yang dilaporkan oleh Ombudsman. Dikatakan 37 orang telah terbunuh di tangan polisi antara awal protes hingga 4 Mei. Dalam rentang waktu yang sama, kelompok itu telah melaporkan lebih dari 1.443

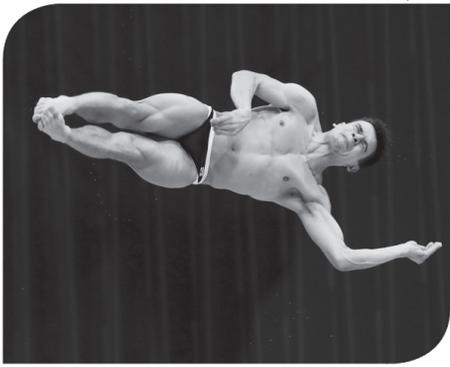
kasus kebrutalan polisi, 831 penangkapan sewenang-wenang dan setidaknya 10 korban pelecehan seksual oleh pasukan publik. Emilia Marquez Pizano, direktur di Temblores, mengatakan kepada CBS News Rabu bahwa pembunuhan itu sangat memprihatinkan. "Banyak dari tindakan ini terjadi tanpa protokol dan cara polisi yang harus bertindak selama protes," katanya, menambahkan bahwa polisi perlu melindungi hak untuk protes damai dan proses yang semestinya. Dia mengatakan tanggapan pemerintah sejauh ini dapat memicu demonstrasi lebih lanjut. "Kami belum melihat pesan dari pemerintah kepada pasukan publik untuk diukur dengan kekuatan yang berlebihan dan mengambil tindakan lebih untuk melindungi hak dan kehidupan penduduk sipil," katanya. "Sebaliknya, apa yang kami lihat dalam pesan dari pemerintah adalah seruan untuk lebih banyak militerisasi dan tentang bahasa di sekitar protes damai yang mereka sebut 'terorisme dan vandalisme, dan tidak sah.' Dan itu sesuatu yang tidak bisa kami perkenankan," imbuhnya. Marquez mendesak pengunjuk rasa untuk mengikuti jam malam yang diberlakukan di negara itu karena keselamatan mereka tidak dapat dijamin. Pemandangan seperti perang telah muncul dari dalam Kolombia dalam beberapa hari terakhir, karena foto menunjukkan kerusakan pada bangunan dan udara yang dipenuhi gas air mata. Satu video menunjukkan helikopter terbang di atas Buga, Valle del Cauca, sementara suara tembakan terdengar di latar belakang. Ada laporan lokal tentang penjarahan dan kantor polisi yang terbakar di Bogota. Sementara itu, pemerintah Kolombia menyalahkan aksi kekerasan yang terjadi pada pemberontak sayap kiri. "Kekerasan itu sistematis, direncanakan dan dibiayai oleh organisasi kriminal," kata Menteri Pertahanan Diego Molano Senin malam lalu. Pada Selasa malam, Duque menyerukan massa untuk tenang dan dialog nasional karena lebih banyak aksi protes direncanakan. "Saya ingin mengumumkan bahwa kami akan menciptakan ruang untuk mendengarkan warga dan membangun solusi yang berorientasi pada tujuan tersebut, di mana patriotisme kita yang paling dalam, dan bukan perbedaan politik, harus menjadi perantara," kata Duque. ● tom

Polisi Korsel Gerebek Kantor Aktivis Anti Korut

SEOUL(IM) - Polisi Korea Selatan (Korsel) menggerebek kantor kelompok aktivis anti-Korea Utara (Korut) pada Kamis (6/5). Itu dilakukan setelah mereka mengatakan telah melepaskan balon ke Korut yang membawa uang kertas dan selebaran berisi kecaman terhadap pemerintah di Pyongyang pada pekan lalu. Pelepasan balon berisi propaganda, meskipun dilarang oleh undang-undang baru di Korsel, dapat memicu kecaman dari Korut. Tahun lalu, Korut melecehkan kantor penghubung bersama dan mengancam aksi militer setelah dibuat naik pitam oleh selebaran propaganda. Polisi Korsel mengatakan mereka mengeksekusi surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kantor Pejuang untuk Pembebasan Korea Utara di Seoul, sebuah kelompok yang dipimpin oleh Park Sang-hak, yang membelot dari negara tetangga pada tahun 2000. "Tujuh petugas polisi menggerebek kantor saya sekitar pukul 10:10 pagi," kata Park kepada Reuters yang dinukil US News. Polisi dan militer telah menyelidiki klaim kelompok tersebut bahwa mereka meluncurkan 10 balon iklan dari provinsi perbatasan yang membawa 500 ribu selebaran, 500 buket dan 5.000 uang kertas satu dolar. "Penyelidikan sedang dilakukan dan kami menerima surat perintah penggeledahan dan penyitaan pagi ini," kata seorang petugas polisi melalui telepon. Kementerian Unifikasi Seoul, yang menangani hubungan dengan Korut, mengatakan telah melihat laporan media tentang penggeledahan tersebut, tetapi menolak berkomentar selama penyelidikan. Pada hari Minggu, Kim Yo-jong, seorang pejabat senior pemerintah Korut dan saudara perempuan dari pemimpinnya Kim Jong-un, dengan tajam mengkritik Korsel karena gagal menghentikan peluncuran tersebut. "Kami menganggap manuver yang dilakukan oleh kotoran manusia di Selatan sebagai provokasi serius terhadap negara kami dan akan mempertimbangkan tindakan yang sesuai," kata media pemerintah mengutip Kim Yo-jong, tanpa menjelaskan lebih lanjut. ● gul

Negara G7 Lawan Aktor Pengancam Demokrasi

LONDON(IM) - Kelompok negara-negara kaya (G7) berjanji untuk mempertahankan demokrasi dari ancaman asing. Kelompok yang terdiri dari tujuh negara ini berkomitmen memperjuangkan nilai-nilai bersama di antara negara-negara sahabat dan demokratis. Aliansi internasional dalam pernyataan bersama Rabu (5/5) waktu setempat, meminta negara-negara bersama menunjung nilai dan prinsip yang sama untuk bersatu melawan entitas yang benesiko bagi demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia yang fundamental. "Kami berkomitmen untuk perlindungan, promosi dan dorongan masyarakat terbuka dan sistem demokrasi yang mendukung mereka," kata pernyataan bersama tersebut yang dikutip laman Anadolu Agency, Kamis (6/5). "Aktor jahat asing tetap berusaha untuk merusak demokrasi, dan beberapa negara berusaha untuk mempromosikan sistem pemerintahan otoriter dan tujuan geopolitik mereka sendiri," tulis pernyataan tersebut. Untuk itu, G7 berkomitmen untuk bekerja bersama menunjukkan kepemimpinan global dan mengambil tindakan untuk mengungkap dan menghalangi para aktor ini guna mempertahankan demokrasi. Organisasi antarpemerintah juga mengakui bahwa upaya tertentu telah dilakukan oleh pihak tertentu terhadap negara-negara G7 dan sekutunya dalam mencampuri dan mengganggu proses demokrasi. Mereka menyebarkan informasi yang salah. Selain itu, para aktor jahat ini telah menggunakan berbagai macam alat untuk mencapai tujuan mereka. Upaya-upaya tersebut termasuk distribusi artifisial dan penguatan informasi yang menyesatkan dan tidak benar, niat untuk meningkatkan perpecahan dan kebencian di antara kelompok-kelompok minoritas dan membuat perpecahan di antara berbagai komunitas, serta manipulasi dan mendistrosi wacana politik yang mengancam kepentingan nasional. Ini juga termasuk upaya untuk merusak kepercayaan pada lembaga dan proses demokrasi, mempengaruhi media independen, memanipulasi wacana sipil, menutup ruang sipil, merusak kohesi sosial dan mengancam kesehatan publik," kata pernyataan bersama. ● ans



KEJUARAAN DUNIA FINA DIVING 2021 Perenang asal Meksiko Rodrigo Diego berkompetisi dalam babak semifinal 3m springboard putra dalam Kejuaraan Dunia FINA Diving 2021 dan Test Event Aquatics Olimpiade Tokyo 2020 di Tokyo Aquatics Centre, Tokyo, Jepang, Kamis (6/5).

India Diperingatkan Ancaman Gelombang Covid-19 Lanjutan

NEW DELHI(IM) - Peminat ilmiah untuk pemerintah India, K. VijayRaghavan, memperingatkan negara itu pasti akan menghadapi gelombang lebih lanjut pandemi virus corona. Kondisi itu diprediksi dari laporan hampir 4.000 orang meninggal dalam waktu sehari. VijayRaghavan memperingatkan bahwa bahkan setelah tingkat infeksi mereda, negara harus siap untuk gelombang

ketiga. "Fase Tiga tidak bisa dihindari, mengingat tingginya tingkat virus yang beredar. Namun, tidak jelas pada skala waktu apa fase tiga ini akan terjadi. Kita harus bersiap untuk gelombang baru," katanya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan dalam laporan minggu bahwa India menyumbang hampir setengah dari kasus virus corona yang dilaporkan di seluruh dunia minggu lalu dan seperempat dari kematian. Banyak orang meninggal di ambulans dan tempat parkir mobil menunggu tempat tidur atau oksigen, sementara kamar mayat dan krematorium berujung untuk menangani aliran jenazah yang tampaknya tak terhentikan. Kementerian Kesehatan India melaporkan, kematian naik dengan rekor 3.780 selama 24 jam terakhir dan infeksi harian naik 382.315 pada Rabu (5/5). Jumlahnya telah melebihi 300.000 setiap hari selama dua minggu terakhir.

Lonjakan infeksi bertepatan dengan penurunan drastis dalam vaksinasi karena masalah pasokan dan pengiriman, meskipun India adalah produsen vaksin utama. Setidaknya tiga negara bagian, termasuk Maharashtra, rumah bagi ibu kota kemaharshi Mumbai, telah melaporkan kelangkaan vaksin, menuntut beberapa pusat inokulasi. Antrean panjang terbentuk di luar dua pusat di kota barat yang masih memiliki persediaan vaksin. Beberapa dari mereka yang menunggu meminta polisi untuk membuka gerbang lebih awal. Pemerintah mengatakan kapasitas produksi obat antivirus remdesivir yang digunakan untuk mengobati pasien Covid-19 telah meningkat tiga kali lipat menjadi 10,3 juta botol per bulan, naik dari 3,8 juta botol pada bulan lalu. Namun, Devyan Penelitian Medis India menyatakan, pengujian harian telah turun tajam menjadi 1,5 juta dari puncak 1,95 juta pada 1 Mei. ● ans

Financial statements for PT. TEXMACO PERKASA ENGINEERING Tbk. and subsidiaries. Includes sections for LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN, LAPORAN LABA (RUGI) KOMPRESHENSIF KONSOLIDASIAN, LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN, and LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN.

DK PBB Didesak Keluarkan Embargo Senjata untuk Junta Myanmar

NAYPYIDAW(IM) - Amnesty International dan lebih dari 200 organisasi non-pemerintah lainnya telah menyerukan embargo senjata global terhadap Myanmar, Kamis (6/5). Desakan ini muncul akibat tindakan keras yang terus berlanjut oleh militer terhadap pengunjuk rasa setelah kudeta pada Februari. "Sudah waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan spesialnya untuk memberlakukan embargo senjata global yang komprehensif untuk mencoba dan mengakhiri pembunuhan besar-besaran militer," ujar Advokat senior PBB untuk Amnesty International, Lawrence Moss, dikutip dari Aljazeera pada Rabu (5/5). Moss mengatakan kecaman yang sudah diberikan oleh komunitas internasional sejauh ini tidak berpengaruh. Mereka meminta Inggris sebagai konsektor teks Myanmar yang ditunjuk Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera membuka negosiasi di lembaga itu tentang rancangan resolusi yang mengesahkan embargo senjata. "Tidak ada pemerintah yang boleh menjatu satu peluru pun ke junta dalam keadaan seperti ini. Menerapkan embargo senjata global ke Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat," ujar Moss. Seruan itu menggemakan deklarasi 24 Februari oleh lebih dari 100 organisasi non-pemerintah. Mereka mendesak DK PBB bertindak cepat untuk menghentikan aliran senjata ke pemerintah militer. DK PBB telah mengeluarkan beberapa pernyataan sejak kudeta, menyerukan militer untuk memulihkan demokrasi dan menghentikan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa. Namun, kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa waktu untuk memberikan pernyataan telah berlalu. "Dewan Keamanan harus membawa konsensusnya tentang Myanmar ke tingkat yang baru dan menyetujui tindakan segera dan substantif. Embargo senjata akan menjadi inti dari upaya global untuk melindungi rakyat Myanmar dari kejahatan lebih lanjut dan membantu mengakhiri impunitas atas kejahatan di bawah hukum internasional," kata kelompok itu. Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Peristiwa ini memicu pemberontakan massal dengan protes harian dan boikot nasional dari pegawai negeri. Sejauh ini, hampir 770 orang telah meninggal dalam tindakan keras mematikan dan lebih dari 4.500 orang telah dipenjarakan. Pemerintah militer telah melaporkan jumlah kematian yang jauh lebih rendah yang dituduhkan pada perush. ● gul